

## PROGRAM MALU MENGANGGUR (STUDI IMPLEMENTASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Rizkiana Nuansa Antari<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2</sup>, Ita Prihantika<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung

Jalan Soemantri Brodjonegoro No.1, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35141  
itaprihantika@fisip.unila.ac.id

**ABSTRACT.** *A program called "Malu Menganggur" is an independent workforce program aims to empower communities from local government of East Lampung regency by providing specialized training to create products and its market home-based products by forming industry groups. The purpose of this study is to analyze the implementation of "Malu Menganggur" program and to analyze the obstacles in the implementation of "Malu Menganggur" program by the Department of Cooperatives of Small and Medium Enterprises and Manpower of East Lampung regency in Jabung and Purbolinggo sub-districts. The method used in this research was qualitative approach. The data collection techniques were conducted through interviews, observation and documentation.*

*The results showed that the implementation of "Malu Menganggur" program has not been well implemented, especially in the sub-district of Jabung. The limited implementation of the program was due to the uneven accomplishment of the program. The implementation of Malu Menganggur program, in Jabung sub-district did not develop because people merely focused on the funds and not being independent. While in Purbolinggo sub-district, the community was very enthusiastic although with circumstances of limited facilities and limited knowledge about the concept of self-employment. The inhibiting factors in the implementation of Malu Menganggur program was divided into internal and external factors. The internal factors was the limited funding from Local Government, there was no special fund allocated for Malu Menganggur program. While the external factors included: the lack of public awareness and community participation in the implementation of the program, the less awareness of the community to be open minded about the concept of self-employment. There are several suggestions for this research: it is necessary to hold socialization of advanced self-employment, to build a good coordination among the Activity Unit Management, and the local government must allocate special fund for Malu Menganggur program.*

**Keywords:** *Malu Menganggur Program, policy implementation*

**ABSTRAK.** Program Malu Menganggur merupakan suatu program tenaga kerja mandiri untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan khusus untuk membuat produk dan memasarkan produk rumahan dengan membentuk kelompok industri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Malu Menganggur dan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

**Kata kunci:** Program Malu Menganggur, implementasi kebijakan

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah. Apabila seseorang tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Lampung Tahun 2014**

No.	Kabupaten	Penduduk Miskin (%)
1	Lampung Utara	23,67
2	Pesawaran	17,86
3	Lampung Timur	17,38
4	Lampung Selatan	17,09

Sumber: BPS Lampung Timur, 2014

Berdasarkan tabel 1, persentase penduduk miskin terbanyak di Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur, dimana Kabupaten ini berada di peringkat ketiga kategori persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung setelah Lampung Utara dan Pesawaran. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Timur Ir.Anwar menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan di daerah ini hingga sekarang belum mencapai sasaran, hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang ditegaskan oleh pemerintah pusat (BPS Lampung Timur, 2014).

Beberapa bidang yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah adalah

pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kondisi lingkungan. Apabila bidang-bidang ini mendapat prioritas dalam pembangunan daerah maka dapat diharapkan IPM (indikator yang mengukur pencapaian suatu daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak) Lampung Timur dapat lebih baik secara mutlak maupun peringkat. Oleh karena itu, sentuhan "tangan dingin" kepala daerah perempuan pertama di Lampung dan Sumatera ini benar-benar akan dinantikan untuk dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan serius di daerah ini, seperti kemiskinan yang berkorelasi dengan tingginya angka kriminalitas.

Pembangunan ekonomi lokal diperlukan adanya peranan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan perekonomian daerah, dimana peranan pemerintah disini adalah untuk memutuskan kebijakankebijakan yang memberikan iklim kondusif untuk dunia usaha. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk mengurangi disparasi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Tujuan tersebut yaitu memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Program penanggulangan pengangguran telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain oleh Pemerintah Kota Cimahi (Bapeda

Kota Cimahi, 2014), Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Kota Denpasar (Budiana, 2009), dan implementasi Program Jaring *Jangkau, Sinergi dan Guideline* (Ani, 2017).

Kota Cimahi mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah dengan melihat potensi dan sumber daya lokal yang melimpah, yaitu produksi susu dari peternakan di kota tersebut (Bapeda Kota Cimahi, 2014). Program ini mampu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di kota tersebut.

Hasil penelitian Budiana (2009) menemukan bahwa efektivitas program penanggulangan tercapai pada dimensi ketepatan sasaran dan tujuan program serta sosialisasi. Dimensi pemantauan program dinilai tidak efektif. Sedangkan penelitian Ani & Sulistio (2017) menemukan bahwa dalam pelaksanaan program yang bertujuan mengurangi pengangguran, terdapat kendala keterbatasan anggaran. Namun, perbedaan kendala dari penelitian terdahulu adalah partisipasi masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manajemen pemasaran dan sumber daya alam yang tidak menentu.

Khusus untuk Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan program pemberantasan pengangguran kondisi nyata di lapangan yaitu:

- a) Minimnya lapangan pekerjaan yang membuat pengangguran semakin meningkat;
- b) Adanya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok industri yang tidak terkondisikan dengan baik, mereka sudah mampu menghasilkan produk rumahan tetapi masih minimnya pengetahuan mereka dalam proses pemasaran sehingga kelompok industri tersebut tidak hidup;

- c) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi jalannya pembangunan ekonomi lokal;
- d) Kurangnya partisipasi masyarakat yang sulit berfikir maju, mereka tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur kemudian memberdayakan masyarakat daerah untuk pembangunan ekonomi lokal melalui “Program Malu Menganggur” dimana program ini mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan tenaga kerja mandiri dan lapangan pekerjaan rumahan (home industry) dengan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah yang akan diberikan program tersebut. Sosialisasi dan pelatihan terkait Program Malu Menganggur ini akan dilaksanakan di 24 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, sementara pelatihan yang sudah dilakukan yaitu di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo.

## METODE

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan teknik triangulasi data (Miles & Hubberman, 2002).

Untuk membantu penelitian, maka penulis menggunakan indikator implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1978) yaitu standar,

sasaran dan indikator output, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Standar, Sasaran dan Indikator Output*

Standar dan sasaran serta indikator output Program Malu Menganggur telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun pencapaian tersebut belum maksimal karena masyarakat belum paham tentang konsep tenaga kerja mandiri. Kemudian di Kecamatan Jabung belum bisa mencapai target karena kelompok industri yang sudah dibentuk tidak berkembang.

Standar dan sasaran kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.1014.D/09/SK/2016 tentang penetapan penyuluh dan koordinator penyuluh tenaga kerja mandiri Kabupaten Lampung Timur. Menimbang bahwa dalam rangka upaya penciptaan usaha mandiri guna mengurangi jumlah pencari kerja, dipandang perlu menetapkan penyuluh dan koordinator penyuluh tenaga kerja mandiri Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, terkait dengan tenaga kerja mandiri pada Program Malu Menganggur di atas, standar dan tujuan dari kebijakan Program Malu Menganggur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada. Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan tenaga kerja mandiri dalam Program Malu Menganggur. Implementasi akan menjadi efektif apabila standar dan sasaran dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi sosio kultur yang ada. Implementasi kebijakan yang berhasil, kemungkinan

akan gagal jika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan sasaran kebijakan.

Program Malu Menganggur mempunyai sasaran kebijakan yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang mandiri dan menjadi usaha kerja, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan sebagai bentuk pembangunan ekonomi lokal di daerah.

Standar dan sasaran kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1978) adalah kinerja implementasi kebijakan yang diukur dari tingkat keberhasilannya jika standar kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada pada pelaksanaan kebijakan. Standar dan sasaran dari kebijakan tenaga kerja mandiri pada Program Malu Menganggur telah dibuat dengan jelas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang tenaga kerja mandiri dalam upaya penciptaan usaha mandiri guna mengurangi jumlah pencari kerja pada pembangunan daerah serta dijelaskan juga pada prinsip-prinsip dasar tenaga kerja mandiri. Dalam rangka pembangunan ekonomi lokal di daerah melalui penumbuhan dan peningkatan usaha mandiri, keberhasilan program juga diukur dengan adanya strategi Program Malu Menganggur, sehingga dapat berperan dalam proses pembangunan daerah.

Berdasarkan wawancara dari Unit Pelaksana Kegiatan dan masyarakat pada hasil penelitian, dinilai sudah sesuai dengan apa yang Van Meter dan Van Horn sampaikan, yaitu salah satu indikator keberhasilan Program Malu Menganggur di Jabung dan Purbolinggo ini adalah terlaksananya standar dan sasaran kebijakan pada Program Malu Menganggur dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tenaga kerja mandiri, sehingga

terciptanya sasaran dan keluaran program yang diharapkan. Pemahaman dari para pelaksana mengenai sasaran dari tenaga kerja mandiri dalam pelaksanaan Program Malu Menganggur, dinilai sudah memahami sasaran dari kebijakan tersebut. Terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Unit pengelola Kegiatan Program Malu Menganggur dan para koordinator serta pendamping yang menjadi pelaksana dari Program Malu Menganggur. Para pelaksana yang menjadi informan peneliti sudah mengetahui terhadap sasaran pelaksanaan Program Malu Menganggur yang berkaitan dengan tenaga kerja mandiri.

### **Sumber Daya**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Pada tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan proses implementasi. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap kebijakan harus mendapat dukungan sumber daya manusia yang baik pula untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih maksimal. Sumber daya manusia mencakup kepada keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugas, perintah, anjuran dari atasan dan pimpinan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa ada sumber daya manusia sebagai implementor dari

Sumber daya yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam mengimplementasikan Program Malu Menganggur telah berjalan. Tim Penyuluh (pendamping) juga telah dibuat. Anggaran dana Program Malu Menganggur dari APBD sudah ada, tetapi belum adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur di tingkat Kecamatan, program tersebut dilaksanakan dan didanai berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja.

Selain sumber daya manusia, sumber daya financial juga merupakan hal yang penting dalam implementasi sebuah program. Anggaran merupakan salah satu indikator pendukung dalam implementasi kebijakan, dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, tetapi tidak didukung dengan anggaran yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, atau akan terjadi ketimpangan. Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagai penanggungjawab Program Malu Menganggur. Karena Program Malu Menganggur merupakan program Pemerintah Daerah.

Sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumberdaya finansial karena merupakan salah satu indikator yang penting dalam sebuah kegiatan. Meskipun ketika sumber daya manusia yang berkompeten telah tersedia, sedangkan

dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan publik untuk direalisasikan apa yang hendak dituju oleh sasaran kebijakan publik. Berkenaan dengan sumber daya finansial yang ada dalam variabel sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn, salah satu dari agen pelaksana yaitu Bapak Sudian Leri Setiawan selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur menjelaskan bahwa untuk menjalankan Program Malu Menganggur, dana yang diluncurkan ialah dana dari APBD. Dimana dalam anggaran tersebut sudah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pelatihan terkait tenaga kerja

Anggaran dana kegiatan Program Malu Menganggur bersumber dari APBD. Namun anggaran dana yang ada belum dapat memberikan dukungan secara penuh untuk implemetasi kegiatan Program Malu Menganggur, hal itu dapat dilihat dari belum adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur, jadi selebihnya jika ada kegiatan lain yang berhubungan dengan program selain pelatihan tersebut, maka dana berasal dari kas masing-masing kelompok industri tersebut. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang Van Meter dan Van Horn sampaikan mengenai ketersediaannya dana khusus yang kemudian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan turut mendukung proses pelaksanaan Program Malu Menganggur agar program yang dibawakan untuk masyarakat tidak mengalami hambatan. Partisipasi masyarakat setempat sangat diharapkan terutama partisipasi dalam bentuk uang melalui kas bulanan pada setiap kelompok industri, dimana hal ini untuk mengantisipasi faktor pendanaan apabila terjadi kemacetan dari pemerintah.

### ***Karakteristik Agen Pelaksana***

Pada poin ini yang menjadi perhatian pada agen pelaksana adalah organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh birokrasi, norma-norma dan pola hubungan dalam birokrasi yang mana dipengaruhi juga oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Lembaga pelaksana kegiatan Program Malu Menganggur ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur dalam bentuk tim penyuluh tenaga kerja mandiri dimana meraka adalah sebagai pendamping pada pelaksanaan program. Kinerja implementasi kebijakanditentukan oleh sejauh mana pelaksana dapat berpartisipasi dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pelaksanaan Program Malu Menganggur selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dengan melihat kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tim pendamping juga berperan aktif mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu pada suatu kebijakan yang menjadi perhatian para pelaksana yaitu meliputi organisasi formal dan organisasi informal.

Karakter dari agen pelaksana menjadi pusat perhatian yang meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat di dalamnya. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Agen pelaksana yang terlibat dalam Program Malu menanggung yaitu dapat dilihat dari 3 tingkatan yaitu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena cakupan wilayah yang luas, maka masing-masing implementor saling melakukan koordinasi dengan Tim pendamping lainnya dalam melaksanakan Program Malu Menganggur. Partisipasi dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi, tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup tinggi dengan keikutsertaannya dalam setiap pelatihan yang diberikan dari Dinas.

Menurut Van Meter dan Van Horn, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada pelaksanaan Program Malu Menganggur, Ibu Susi sebagai fasilitator di Kecamatan Purbolinggo mengatakan bahwa Pelaksanaan Program Malu Menganggur ini dapat dilihat dari 3 tingkatan yaitu tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Masing-masing implementor akan melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping di Kecamatan Jabung dan Tim Pendamping di Kecamatan Purbolinggo dalam melaksanakan tahapan Program Malu Menganggur. Sementara untuk pihak organisasi informal, terdapat pihak lain yang ikut terlibat yaitu DPR, DPRD, dan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pihak yang melakukan pemantauan secara independen.

Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan bahwa dari program yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo tentunya memerlukan pengembangan lanjutan dari pihak pengelola Program Malu Menganggur. Menurut peneliti karakter dari agen pelaksana dalam Program Malu Menganggur dinilai sudah sesuai dengan ciri-ciri karakter agen pelaksana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dengan melihat prinsip-prinsip dasar tenaga kerja mandiri, serta memahami kebutuhan dari masyarakat. Tim pengelola dan pelaksana kegiatan memiliki ketegasan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan

Menyangkut karakteristik agen pelaksana, dapat dilihat dari ketegasan dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan Program Malu Menganggur. Dalam pelaksanaan program tersebut, dibentuk tim yang

bertanggungjawab atas terlaksananya Program Malu Menganggur, tetapi tanggungjawab tersebut belum maksimal dilakukan.

### **Disposisi**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan, sikap para pelaksana yang dalam hal ini adalah tim fasilitator dan Unit Pengelola Kegiatan Program Malu Menganggur sudah cukup baik dalam mendukung penerapan aspek tenaga kerja mandiri dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, mereka mempunyai aktivitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Sikap dari para pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan implementasi. Keselarasan agen pelaksana dengan implementasi kebijakan yang dijalankan haruslah sesuai, sikap implementor yang positif terhadap kegiatan yang harus dilakukan maka ada kecenderungan berhasil dalam pelaksanaannya. Sebaiknya jika para pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap tenaga kerja mandiri, maka ada kecenderungan pencapaian tujuan tidak akan terwujud secara efektif dan efisien. Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Pada disposisi implementor, kecenderungan pelaksana memegang peran cukup besar dalam implementasi kebijakan Program Malu Menganggur. Sikap pelaksana mendukung adanya pelaksanaan kebijakan tersebut, hampir semua Tim Fasilitator ikut serta dalam

pelaksanaan kegiatan. Mereka mempunyai komitmen untuk senantiasa melibatkan masyarakat miskin dan menganggur dalam pelaksanaan program, mereka juga tidak bosan mengingatkan Kepada Tim Pendamping kegiatan Program Malu Menganggur agar masyarakat tersebut selalu terlibat. Sikap pelaksana tanggung jawab dalam pelaksanaan program, mereka turun langsung ke lapangan untuk mengawasi masyarakat dalam melaksanakan program dari mulai sosialisasi sampai masyarakat bisa membuat produk.

### ***Keberhasilan yang Dicapai***

Keberhasilan yang dicapai pada implementasi Program Malu Menganggur tidak terlepas dari komunikasi yang tepat antar organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana. Pemberian instruksi yang cukup baik dari Lembaga Pelatihan Kerja kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tetapi koordinasi dari Dinas dengan aparat Kecamatan dan Desa yang mempunyai hubungan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat belum maksimal. Komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pelaku-pelaku di Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Program Malu Menganggur juga belum maksimal.

### ***Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik***

Hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor yang mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan Program Malu Menganggur. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat kinerja implementasi

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk menjalankan implementasi kebijakan juga harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Tabel 1. Persentasi Pengangguran di Lampung Timur**

Tahun	Lampung Timur	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	2,85	2,26	3,94
2013	5,62	5,83	5,20
2014	5,00	3,04	9,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2015.

Khusus untuk Kabupaten Lampung Timur, data BPS (2015) menunjukkan pengangguran didominasi oleh kaum perempuan (lihat tabel 1). Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, pelaksanaan kegiatan Program Malu Menganggur dalam bentuk pelatihan tenaga kerja mandiri (las listrik di Kecamatan Jabung dan membuat di Kecamatan Purbolinggo) ditujukan untuk kedua jenis kelompok penduduk, laki-laki dan perempuan.

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dinilai cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan Program Malu Menganggur terutama di Kecamatan Purbolinggo, perbedaan suku mempengaruhi pelaksanaan program. Kondisi politik masyarakat termasuk kondusif, karena telah mengeluarkan surat keputusan terkait tenaga kerja mandiri khususnya di bidang pembangunan daerah

### **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Malu Menganggur belum dilaksanakan dengan baik terutama di Kecamatan Jabung. Kurang maksimalnya pelaksanaan program dikarenakan pencapaiannya belum menunjukkan hasil yang merata.



Pelaksanaan Program Malu Menganggur, di Kecamatan Jabung terlihat sangat sulit untuk berkembang karena masyarakat hanya terfokuskan dengan dana dan tidak mandiri.

Di Kecamatan Purbolinggo, masyarakat sangat antusias meskipun dengan fasilitas yang terbatas juga dengan keterbatasan pengetahuan tentang konsep tenaga kerja mandiri.

Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Program Malu Menganggur adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah, belum adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur. Faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sulitnya masyarakat untuk berfikir maju dan belum pahamnya masyarakat tentang konsep tenaga kerja mandiri. Saran penelitian, perlu adanya sosialisasi lanjutan tenaga kerja mandiri, perlu adanya koordinasi yang baik antar Unit Pengelola Kegiatan, dan perlu adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ani, S., & Sulistio, E.B. (2017). "Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan ADMINISTRATIO*, Vol. 8, No. 1, Januari - Juni 2017. pp. 104 -113.
- Budiani, N. W., (2009). "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol. 2, No.1, 2009.
- BPS Kabupaten Lampung Timur 2015
- Bappeda, 2014. Survei Potensi Sosial Ekonomi Sentra Susu Sapi Cipageran Kota Cimahi. Bappeda Kota Cimahi.
- BPS Lampung Timur, 2014. <https://lampungtimurkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.1014.D/09/SK/2016 tentang penetapan penyuluh dan koordinator penyuluh tenaga kerja mandiri Kabupaten Lampung Timur
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1978). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.